



LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI *capaian kinerja* TRIWULAN IV 2024

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KATA PENGANTAR

Purwakarta 10 Januari 2025

Assalammu'alaikum wr.wb,

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 20224 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta dapat selesai tepat waktu. Laporan disusun untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Pedoman penyusunan Laporan Kinerja ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja secara substantif merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Penerbitan laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien, efektif, bersih, transparan dan akuntabel dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance).

Laporan Monitoring Kinerja ini juga memuat analisis dan evaluasi untuk meningkatkan perencanaan dan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta pada periode berikutnya.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan yang akuntabel merupakan suatu keharusan yang perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah aspirasi dan cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, akuntabel serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Perubahan Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Maka Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta (Selanjutnya disingkat dengan BKAD Kabupaten Purwakarta) memiliki kewajiban untuk melaksanakan manajemen pengelolaan kinerja meliputi: komponen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi.

Monitoring dan evaluasi dalam kaitannya dengan manajemen kinerja adalah Evaluasi Rencana Aksi Kinerja untuk memantau setiap perubahan-perubahan dan perbaikan atas rencana aksi pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) sehingga dapat mendeteksi secara lebih dini tentang hasil capaian kinerja secara berkala, faktor penghambat serta faktor pendukung sehingga dapat ditemukan upaya-upaya perbaikan sehingga capaian kinerja dapat dicapai lebih optimal. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menciptakan tatalaksana pemerintahan yang baik (Good Governance) sebagai prasyarat bagi setiap organisasi pemerintah daerah

maka dibuatlah Laporan Kinerja yang berpedoman pada berbagai peraturan perundang-undangan seperti:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

1.2 Tujuan Pelaporan Kinerja

dapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan monitoring dan evaluasi capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta TW IV tahun 2024 adalah:

Untuk mengendalikan seluruh proses pencapaian target kinerja dan pengendalian atas proses pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran strategis dan IKU dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan;

Untuk mengendalikan seluruh proses pencapaian target kinerja dan pengendalian atas proses pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran strategis dan IKU dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan;

Untuk mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta menuju terwujudnya good governance, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat.

1.3 Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan laporan realisasi rencana aksi capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta seperti berikut:

Bab I Pendahuluan	Menyajikan latar belakang, maksud dan tujuan serta sistematika laporan
Bab II Perencanaan Kinerja	Menyajikan mengenai Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta 2024-2026 & Perjanjian Kinerja.
Bab III Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Menggambarkan kriteria ukuran keberhasilan, rencana akdi, capaian kinerja realisasi anggaran, menjelaskan factor pendukung dan factor penghambat capaian kinerja dan rekomendasi tindak lanjut
Bab IV Penutup	Menyajikan penjelasan singkat mengenai kesimpulan dan saran.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambarmn sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu tiga tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran ssuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan renstra telah mengacu pada RPD Kabupaten Purwakarta tahw 2024-2026, khusus terkait dengan prioritas pembangunan pada bidang latakelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip good governance dan clean government.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta memberikan kontribusi terhadap perwujudan visi dan misi Kabupaten Purwakarta.

VISI : "PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH"

Visi ini mengerahkan segala potensi yang ada guna mencapai suatu kondisi wilayah dengan tatanan Purwakarta istimewa dalam nilai yang bersifat realitas, bukan hanya dari sisi tekstual, tetapi harus lebih bersifat aplikatif konstektual mewujudkan purwakana istimewa menjadi semangat yang nyata dengan semangat 5 sila dari Pancasila.

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Purwakarta maka sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah, memberikan kontribusi terhadap misi 5 (lima) yang telah ditetapkan, yaitu:

Misi 5 : 'Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat'

Tujuan dari Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026 adalah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel. Adapun sasaran dari Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026 adalah :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara mendalam untuk mencapai sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta yang akan digunakan untuk periode tahun 2024-2026 sesuai periode renstra telah ditetapkan, tentang penetapan indikator kinerja utama Badan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta seperti berikut:

Tabel 2.1

**Indikator Kinerja Utama
Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Satuan	Target 2024	Target 2025	Target 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	A	A
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Predikat IKM hasil survey kepuasan masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik
2	Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah seluruh indeks pada setiap dimensi	Predikat	Baik	Baik	Baik
		Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	Menjumlahkan seluruh nilai pada indeks parameter x bobot parameter	Predikat	Baik	Baik	Baik

Sumber : Dokumen SK IKU BKAD Tahun 2024-2026

2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Satuan	Target 2024
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Predikat IKM hasil survey kepuasan masyarakat	Predikat	Baik
2	Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah seluruh indeks pada setiap dimensi	Predikat	Baik
		Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	Menjumlahkan seluruh nilai pada indeks parameter x bobot parameter	Predikat	Baik

Sumber : Dokumen TAPKIN BKAD Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target 2024	Program	Indikator Program	Satuan	Target 2024
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A
		Indeks Kepuasan Masyarakat	BAIK				
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	BAIK	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Persen	15
					Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Persen	89
					Opini Laporan Keuangan	Predikat	WTP
					Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	76,14

					Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persen	2,03
					Persentase SILPA terhadap APBD	Persen	1,58
					Persentase belanja pendidikan (20%)	Persen	35
					Persentase belanja kesehatan (10%)	Persen	25
					Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	Persen	1,74
					Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu
					Kesesuaian Dokumen Penganggaran	Skor	6
					Alokasi Anggaran Belanja dalam APBD	Skor	20
					Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Skor	8
					Penyerapan Anggaran	Skor	20
					Kondisi Keuangan Daerah	Skor	4

		Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	BAIK	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Manajemen Aset : 1. Tersedianya daftar asset tetap 2. Tersedianya manual untuk menyusun daftar asset tetap 3. Tersedianya proses inventarisasi asset tahunan 4. Tersedianya nilai asset tercantum dalam laporan anggaran (ya/tidak)	YA	YA
					Persentase BMD yang dimanfaatkan optimal	Persen	100%
					Persentase aset tanah yang sudah bersertifikat	Persen	30%
					Persentase kesesuaian RKA- SKPD dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persen	100%
					Persentase pengolah BMD yang dibina	Persen	100%
					Persentase penyusutan/ penghapusan BMD	Persen	100%
					Pengelolaan BMD yang Akuntabel dan Produktif	Indeks	Baik

					Kepatuhan Pengelolaan BMD terhadap Peraturan Perundang-Undangan	Indeks	Baik
					Pengawasan dan Pengendalian BMD yang Efektif	Indeks	Baik
					Administrasi BMD yang Andal	Indeks	Baik

BAB III

Monitoring Dan Evaluasi

3.1 KRITERIA UKURAN KEBERHASILAN

Pengukuran kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjuk secara langsung kaitan antara sasaran dan indikator kinerjanya. Keberhasilan sasaran berdasarkan pada indikator kinerja utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 yang telah ditetapkan. IKU adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya dan merupakan ikhtisar hasil (outcome) berbagai Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi dengan cara perbandingan sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendah kinerjanya dengan rumusan :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja : } \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerjanya dengan rumusan

:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja : } \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Capaian indikator kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian di kelompokkan kedalam skala

pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Skala Pengukuran Ordinal

PRESENTASE	PREDIKAT
<100	Tidak Tercapai
=100	Tercapai
>100	Melebihi Target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang di harapkan.

3.2 RENCANA AKSI

Rencana Aksi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2024 merupakan penjabaran lebih lanjut atas rencana pelaksanaan perjanjian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 yang dituangkan secara berkala (per bulan atau triwulan). Adapun rencana aksi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 3.2
RENCANA AKSI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

Sasaran Strategis	Indikator	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran	Langkah Aksi	Jadwal Pelaksanaan				Output
							I	II	III	IV	
Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.097.300	Membuat Dokumen perencanaan perangkat daerah		√			Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			9.984.700	Membuat penyusunan dokumen RKA-SKPD			√		Tersusunnya penyusunan dokumen RKA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			9.955.100	Membuat penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD		√			Tersusunnya penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			20.142.000	Membuat penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	√				Tersusunnya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			22.163.000	Membuat Dokumen kinerja perangkat daerah	√				Tersusunnya Dokumen kinerja perangkat daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	87.309.587.533	Membuat Dokumen gaji dan tunjangan ASN	√	√	√	√	Tersusunnya Dokumen gaji dan tunjangan ASN	
			Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.960.200	Memverifikasi berkas bantuan keuangan	√				Tersusunnya berkas bantuan keuangan yang terverifikasi	

				Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000	Membuat Dokumen penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	√				Tersusunya Dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD
				Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.000.000	Membuat Dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	√				Tersusunya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD
			Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000	Membuat Dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	√				Tersusunya laporan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD
				Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	10.000.000	Membuat Dokumen laporan barang milik daerah pada SKPD	√	√	√	√	Tersusunya laporan barang milik daerah pada SKPD
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	327.500.000	melaksanakan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	√				Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
				Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	50.000.000	melaksanakan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	√				Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	198.000.000	melaksanakan Sosialisasi peraturan perundang-undangan		√			Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang-undangan
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	176.000.000	melaksanakan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		√			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000	Melaksanakan pembelian komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	√				Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.000.000	Melaksanakan pembelian peralatan rumah tangga	√				Tersedianya peralatan rumah tangga
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	500.587.992	Melaksanakan pembelian bahan logistik kantor	√	√			Tersedianya bahan logistik kantor
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	449.820.000	Melaksanakan pembelian barang cetak dan penggandaan	√				Tersedianya barang cetak dan penggandaan
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	Melaksanakan penyediaan Bahan Bacaan Peraturan perundang-undangan	√	√			tersedianya Bahan Bacaan Peraturan perundang-undangan
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000	Melaksanakan pembelian kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	√				Tersedianya snack kunjungan tamu
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	210.000.000	Melaksanakan Perjalanan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	√	√			Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
				Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	66.525.000	Melaksanakan penertiban Arsip	√	√			Tersusunnya Arsip
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	74.000.000	Melaksanakan pemeliharaan Server	√	√			Terlaksananya pemeliharaan Server
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	199.532.000	Melaksanakan pembelian mebel	√				Tersedianya mebel Penunjang yang baik
				Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	558.699.000	Melaksanakan pembelian peralatan dan mesin lainnya	√				Tersedianya peralatan dan mesin lainnya

			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	Melaksanakan pembelian materai 10.000	√					Tersedianya Materai 10.000
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	299.400.000	Melaksanakan pembayaran internet selama 12 bulan	√	√	√	√		Tersedianya Jaringan internet selama 1 Tahun
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.146.965.960	menyediakan asa pelayanan umum kantor (ptt)	√	√	√	√		Tersedianya jasa pelayanan umum kantor
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	96.000.000	Melaksanakan pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	√					Terlaksananya pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	152.000.000	Melaksanakan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	√					Terlaksananya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	100.000.000	Melaksanakan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	√					Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	400.000.000	Melaksanakan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	√					Terlaksananya Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	400.000.000	Melaksanakan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	√					Terlaksana nya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	200.000.000	Melaksanakan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	√				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi Dan Penyusunan Kua Dan Ppas	184.159.000	Membuat Dokumen Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	√	√			Tersusunya Dokumen Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS
				Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan Kua Dan Perubahan Ppas	198.105.000	Membuat Dokumen Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS	√	√	√		Tersusunya Dokumen Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS
				Koordinasi, Penyusunan Dan Verifikasi Rka-Skpd	459.750.000	Membuat Dokumen penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD	√	√	√	√	Tersusunya Dokumen penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD
				Koordinasi, Penyusunan Dan Verifikasi Perubahan Rka-Skpd	458.400.000	Membuat Dokumen penyusunan dan verifikasi perubahan RKA-SKPD	√	√			Tersusunya Dokumen penyusunan dan verifikasi perubahan RKA-SKPD
				Koordinasi, Penyusunan Dan Verifikasi Dpa-Skpd	188.092.000	Membuat Dokumen penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD	√	√	√	√	Tersusunya Dokumen penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD
				Koordinasi, Penyusunan Dan Verifikasi Perubahan Dpa-Skpd	229.990.000	Membuat Dokumen penyusunan dan verifikasi perubahan DPA-SKPD	√	√			Tersusunya Dokumen penyusunan dan verifikasi perubahan DPA-SKPD
				Koordinasi Dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Apbd Dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Apbd	751.810.000	Membuat Dokumen penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	√	√			Tersusunya Dokumen penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD

				Koordinasi Dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Apbd Dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Apbd	921.049.000	Membuat Dokumen penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD	√	√	√	√	Tersusunnya Dokumen penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD
				Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	260.000.000	Membuat Dokumen perencanaan anggaran belanja daerah	√	√			Tersusunnya Dokumen perencanaan anggaran belanja daerah
			Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi Dan Pengelolaan Kas Daerah	124.986.000	Membuat Dokumen pengelolaan kas daerah	√	√	√	√	Tersusunnya Dokumen pengelolaan kas daerah
				Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian Dan Penerbitan Anggaran Kas Dan Spd	100.000.000	Penetapan SPD SKPD dan koordinasi dengan SKPD	√	√	√	√	Terlaksananya kegiatan penyusunan SPD
				Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan Dan Dana Transfer Lainnya	124.945.000	Membuat dokumen Rekonsiliasi dana transfer	√		√	√	Tersusunnya Rekonsiliasi dana transfer
				Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, Dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan Dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (Pfk)	49.992.000	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, Dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan Dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (Pfk)	√			√	Tersusunnya Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga
				Rekonsiliasi Data Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan Dan Pematangan Atas Sp2d Dengan Instansi Terkait	125.000.000	membuat dokumen Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pematangan atas SP2D dengan instansi terkait	√	√	√	√	Tersusunnya Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pematangan atas SP2D dengan instansi terkait

				Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan Yang Berkaitan Dengan Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	131.139.000	Membuat SOP Penatausahaan pengelolaan keuangan	√	√			Tersusunnya SOP Penatausahaan keuangan
				Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	282.613.000	Melaksanakan Pembinaan penatausahaan keuangan kepada semua skpd	√	√	√	√	Terlaksananya Pembinaan penatausahaan keuangan kepada semua skpd
				Konsolidasi Laporan Keuangan Skpd, Blud Dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	103.780.000	Membuat dokumen laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah	√	√	√	√	Tersusunnya laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah
			Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi Dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	632.670.000	Membuat Dokumen penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota dan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran	√	√	√	√	Tersusunnya Dokumen penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota dan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran
				Penyusunan Kebijakan Dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	46.050.000	Membuat Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah			√		Terusunnya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan	Analisis Perencanaan Dan Penyaluran Bantuan Keuangan	303.918.370.000	Melaksanakan Perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan untuk 183 Desa	√	√	√	√	Terlaksananya Perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan untuk 183 Desa

			Keuangan Daerah	Pengelolaan Dana Darurat Dan Mendesak	30.148.344.998	Melaksanakan Pengelolaan dana darurat dan mendesak	√	√	√		Terlaksananya Pengelolaan dana darurat dan mendesak
				Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	44.927.822.558	Melaksanakan Pengelolaan dana bagi hasil 183 Desa	√	√	√	√	Terlaksananya Pengelolaan dana bagi hasil 183 Desa
			Pengelolaan Data Dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Implementasi Dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	292.398.000	melakukan Pemeliharaan terhadap sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan	√	√	√	√	Terpeliharanya sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan
				Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	210.280.000	Melakukan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	√	√	√		Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Standar Harga	200.000.000	Membuat Dokumen Penyusunan standar harga	√	√	√	√	Tersusunnya Dokumen Penyusunan standar harga
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	44.500.000	Membuat Dokumen Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	√	√	√		Tersusunnya Dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah
				Penatausahaan Barang Milik Daerah	172.000.000	Membuat Dokumen Penatausahaan barang milik daerah	√	√			Tersusunnya Dokumen Penatausahaan barang milik daerah
				Inventarisasi Barang Milik Daerah	245.226.000	Membuat Dokumen Inventarisasi barang milik daerah	√	√	√		Tersusunnya Dokumen Inventarisasi barang milik daerah
				Pengamanan Barang Milik Daerah	814.632.000	Membuat Dokumen Pengamanan barang milik daerah	√	√	√	√	Tersusunnya Dokumen Pengamanan barang milik daerah

				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Dan Penghapusan Barang Milik Daerah	188.000.000	Melaksanakan pembangunan bale mahasiswa milik pemda	√	√	√	√	terlaksananya pembangunan bale mahasiswa milik pemda
				Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	64.962.000	Membuat Dokumen Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	√	√	√	√	Tersusunnya Dokumen Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah
				Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	171.687.000	Membuat Dokumen Penyusunan laporan barang milik daerah	√	√	√	√	Tersusunnya Dokumen Penyusunan laporan barang milik daerah
				Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	125.000.000	Melaksanakan Pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupaten/kota		√			Terlaksananya Pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupaten/kota

3.3 CAPAIAN KINERJA

Adapun hasil capaian Rencana Aksi kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta untuk Triwulan IV tahun 2024 seperti tabel berikut ini:

TABEL 3.3
Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Sasaran BKAD Kab. Purwakarta
Tahun Anggaran 2024

No	Sasaran	Anggaran	Realisasi		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
			Rp.	%					
1	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	83.123.034.198	38.835.410.669	46,72	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	A	100%
					Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	BAIK	SANGAT BAIK	113,25%
2	Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah	368.559.390.834	338.271.262.499	92,21	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Predikat	BAIK	BAIK	100%
		1.785.774.690	1.290.591.590	72,27	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	Predikat	BAIK	BAIK	100%
JUMLAH		453,468,199,722	378.397.264.758	83,45					

Dari data di atas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran sampai triwulan III Tahun 2024 yaitu sebesar Rp. **378.397.264.758,00,-** atau **83,45%** dari pagu anggaran sebesar **Rp. 453,468,199,722,00,-** dan indicator kinerja sasaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah belum bisa di hitung realisasinya pada triwulan IV.

Capaian indicator kinerja saasaran yaitu sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan indicator Capaian SAKIP Perangkat Daerah dengan target pada tahun 2024 yaitu **A (80-90)** poin. Dan sampai dengan triwulan III sudah keluar nilai sakip yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Purwakarta dengan nilai **89,35** poin.
2. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Indeks Kepuasan Masyarakat belum bisa terhitung karena intensitas pelayanan pada triwulan III masih belum dapat di simpulkan, penilaian IKM harus pada tahun berjalan dan di akhir periode triwulan IV tahun 2024.
3. Sasaran Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah target kinerja nya yaitu BAIK. Menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dan terdapat Penentuan bobot Dimensi IPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran sama dergan 15 (lima belas);

- b. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD sama dengan 20 (dua puluh);
- c. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah sama dengan 15 (lima belas);
- d. Penyerapan anggaran sama dengan 20 (dua puluh);
- e. Kondisi keuangan daerah sama dengan 15 (lima belas); dan
- f. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD sama dengan 15 (lima belas).

Hasil pengukuran IPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) meliputi :

- a. peringkat baik dengan nilai A
 - b. peringkat perlu perbaikan dengan nilai B, dan
 - c. peringkat sangat perlu perbaikan dengan nilai C
4. Sasaran Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah target kinerja nya yaitu BAIK.

Adapun Realisasi Capaian kinerja Program Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta untuk Triwulan III tahun 2024 seperti tabel berikut ini:

TABEL 3.4
Realisasi Capaian kinerja Program BKAD Kabupaten Purwakarta
Triwulan III tahun 2024

No	Program	Anggaran	Realisasi		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
			Rp.	%				
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	83.123.034.198	38.835.410.669	46,72	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	A
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	384.869.795.556	158.846.519.695	41,27	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Persen	15	
					Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Persen	89	74,29
					Opini Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP
					Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	76,14	89,76
					Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persen	2,03	3,7

					Persentase SILPA terhadap APBD	Persen	1,58	3,6
					Persentase belanja pendidikan (20%)	Persen	35	26,79
					Persentase belanja kesehatan (10%)	Persen	25	17,55
					Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	Persen	1,74	1
					Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
					Kesesuaian Dokumen Penganggaran	Skor	6	
					Alokasi Anggaran Belanja dalam APBD	Skor	20	20
					Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Skor	8	8
					Penyerapan Anggaran	Skor	20	14,29
					Kondisi Keuangan Daerah	Skor	4	3,6
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.785.774.690	1.290.591.590	72,27	Manajemen Aset : 1. Tersedianya daftar aset tetap 2. Tersedianya manual untuk menyusun daftar aset tetap 3. Tersedianya proses inventarisasi aset tahunan 4. Tersedianya nilai aset tercantum dalam laporan anggaran (ya/tidak)	YA	YA	YA
					Persentase BMD yang dimanfaatkan optimal	Persen	100%	100
					Persentase aset tanah yang sudah bersertifikat	Persen	30%	33.83
					Persentase kesesuaian RKA-SKPD dengan Rencana	Persen	100%	46,09

					Kebutuhan Barang Milik Daerah			
					Persentase pengolah BMD yang dibina	Persen	100%	100
					Persentase penyusutan/ penghapusan BMD	Persen	100%	
					Pengelolaan BMD yang Akuntabel dan Produktif	Indeks	Baik	Cukup
					Kepatuhan Pengelolaan BMD terhadap Peraturan Perundang-Undangan	Indeks	Baik	Cukup
					Pengawasan dan Pengendalian BMD yang Efektif	Indeks	Baik	Cukup
					Administrasi BMD yang Andal	Indeks	Baik	Cukup

Dari data di atas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran sampai triwulan III Tahun 2024 yaitu sebesar Rp. **378.397.264.758,00,-** atau **83,45%** dari pagu anggaran sebesar **Rp. 453,468,199,722,00,-** dan indikator kinerja sasaran program pada Badan Keuangan dan Aset Daerah belum bisa di hitung realisasinya pada triwulan IV serta Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa dari 27 (Duapuluh Tujuh) Indikator Kinerja Kunci yang telah ditetapkan. Terealisasi mencapai target sebanyak 15 (Lima Belas) IKK dan tidak mencapai target sebanyak 12 (Dua Belas) indikator kinerja “Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)” dibawah target yang ditetapkan dikarenakan Adanya alokasi hibah pilkada serentak tahun 2024 sehingga, pengalokasian hibah secara formulasi mengurangi persentase rasio. Sedangkan terkait “Persentase belanja pendidikan (20%)” dan Persentase belanja kesehatan (10%)” sudah melampaui target yang di tetapkan di Permendagri 86 yaitu sebesar 20% untuk bidang Pendidikan dan 10% untuk bidang Kesehatan hanya saja tidak tercapai untuk target di resntranya. Untuk indikator “Bagi hasil kabupaten/kota dan desa” tidak tercapai karena Belanja Bagi Hasil Kabupaten Purwakarta untuk Desa di hitung berdasarkan realisasi pada tahun berjalan. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tingkat penyerapan anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2024 dengan 2023 berbeda formulasi perhitungannya, 2023 dengan satuan presentase dengan formulasi realisasi belanja / jumlah seluruh anggaran x 100 sedangkan tahun 2024 dengan satuan skor atau indeks dengan formulasi Skor rata-rata x Bobot.

Adapun Realisasi Capaian kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta untuk Triwulan IV tahun 2024 seperti tabel berikut ini:

TABEL 3.5
Realisasi Capaian kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan BKAD Kabupaten Purwakarta
Triwulan III tahun 2024

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran			
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi	Satuan
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	92.342.100	54.497.800							
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.097.000	23.477.800	78,01	100	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang Disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	Dokumen
-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	9.984.700	-	-	100	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang Disusun	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	Dokumen

-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	9.955.100	6.000.000	60,27	100	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang Disusun	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	Dokumen
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.142.000	10.976.500	54,50	100	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang Disusun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	Dokumen
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.163.000	14.043.500	63,36	100	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang Disusun	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	5	Dokumen
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	75.194.170.882	32.316.889.583	42,98						
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	75.159.210.682	32.306.099.583	42,98	100	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	83	83/9	Orang/Bulan
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.960.200	5.113.000	51,33	100	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	9	Dokumen

						Perangkat Daerah				
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000	5.677.000	37,85	100	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	2	Dokumen
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.000.000	-	-	100	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	12	Dokumen
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	22.525.000	9.500.000	42,18						
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	12.525.000	1.100.000	8,78	100	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	1	Dokumen
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000	8.400.000	84,00	100	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	4	Dokumen

4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	983.220.000	740.438.869	75,31	-					
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	327.500.000	327.500.000	100	100	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	2	Paket
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	21.838.869	43,68	100	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	5	Orang
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	101.460.000	-	-	100	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150	150	Orang
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	504.260.000	391.100.000	77,56	100	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100	100	Orang
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.863.707.992	1.746.256.044	93,70						

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000	49.914.000	99,83%	100	Jumlah paket penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	2	Paket
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.000.000	59.678.500	99,46%	100	Jumlah paket penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	5	Paket
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	500.587.992	473.047.200	94,50%	100	Jumlah paket penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	5	Paket
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	449.820.000	413.070.000	91,83%	100	Jumlah paket penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10	10	Paket
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	4.325.000	43,25%	30	Jumlah paket penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	3	Dokumen

	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000	28.485.000	56,97%	75	Jumlah paket penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	Laporan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	210.000.000	201.146.844	95,78%	75	Jumlah paket penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	Laporan
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	159.300.000	150.000.000	94,16%	100	Jumlah paket penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	2	Dokumen
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	374.000.000	366.589.500	98,02%	100	Jumlah paket penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	12	Dokumen
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	971.259.000	970.051.600	99,88%	-					

	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-			-	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1		Unit
	Pengadaan Mebel	199.532.000	199.190.000	99,83%	100	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40	40	Unit
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	721.727.000	199.190.000	99,83%	100	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	45	45	Unit
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	199.190.000	99,83%	100	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	1	1	Unit

7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.530.890.224	2.056.526.520	81,26%						
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	100,00%	100	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	Laporan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	302.200.000	259.565.234	85,89%	100	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	Laporan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.223.690.224	1.791.961.286	80,59%	100	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	Laporan
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.464.919.000	941.250.253	64,25%						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	96.000.000	67.676.923	70,50%	100	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dipelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	5	Unit

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	271.700.000	194.078.830	71,43%	100	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dipelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25	25	Unit
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000	85.045.000	85,05%	100	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	50	Unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	397.291.000	395.106.500	99,47%	100	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dipelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	Unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	400.000.000	-	0,00%	-	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dipelihara	umlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2		Unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000	199.343.000	99,67%	100	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dipelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	Unit
9	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	3.776.729.000	3.308.125.215	87,59%						
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	131.779.000	126.479.000	95,98%	100	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	4	4	Dokumen

	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	148.965.000	132.879.400	89,20%	100	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	4	4	Dokumen
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	638.750.000	487.917.000	76,39%	100	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	4	4	Dokumen
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	457.000.000	451.315.000	98,76%	100	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	1	1	Dokumen
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	72.192.000	54.058.000	74,88%	100	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	2	2	Dokumen
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	229.990.000	187.486.000	81,52%	100	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	1	1	Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	718.060.000	699.395.300	97,40%	100	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	4	4	Dokumen

	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	960.559.000	865.763.900	90,13%	100	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4	4	Dokumen
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	419.434.000	302.831.615	72,20%	100	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1	1	Dokumen
10	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.084.725.000	643.135.800	59,29%						
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	224.986.000	136.930.000	60,86%	100	Jumlah Dokumen Pelaporan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	14	14	Dokumen
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	46.000.000	33.880.000	73,65%	100	Jumlah Dokumen Pelaporan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	3	3	Dokumen
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	124.945.000	36.645.000	29,33%	100	Jumlah Dokumen Pelaporan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	20	20	Dokumen

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	49.992.000	23.216.000	46,44%	100	Jumlah Dokumen Pelaporan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	2	2	Laporan
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	125.000.000	34.800.000	27,84%	100	Jumlah Dokumen Pelaporan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12	12	Dokumen
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	131.189.000	56.684.300	43,21%	100	Jumlah Dokumen Pelaporan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1	1	Dokumen
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	382.613.000	320.980.500	83,89%	100	Jumlah Dokumen Pelaporan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100	100	Orang
11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	730.918.000	607.789.050	83,15%						

	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	160.230.000	152.525.000	95,19%	100	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1	1	Laporan
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	545.968.000	445.014.050	81,51%	100	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2	2	Dokumen
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	24.720.000	10.250.000	41,46%	100	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1	1	Dokumen
12	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	362.564.540.834	333.355.937.434	91,94%						
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	309.266.062.000	308.106.384.800	99,63%	100		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	204	204	Laporan
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	17.442.711.647	23.160.000	0,13%	100		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12	12	Laporan

	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	35.855.767.187	25.226.392.634	70,36%	100		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	183	183	Laporan
13	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	402.478.000	356.275.000	88,52%						
	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	292.398.000	249.005.000	85,16%	100		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1	1	Dokumen
	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	110.080.000	107.270.000	97,45%	100		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	115	115	Orang
14	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.785.774.690	1.290.591.590	72,27%						
	Penyusunan Standar Harga	200.000.000	183.673.350	91,84%	100	Jumlah Dokumen Pelaporan Atas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1	1	Dokumen
	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah					Jumlah Dokumen Pelaporan Atas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	2		Dokumen

	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	44.500.000	26.236.200	58,96%	100	Jumlah Dokumen Pelaporan Atas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2	1	Dokumen
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	172.000.000	157.403.100	91,51%	100	Jumlah Dokumen Pelaporan Atas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1	1	Laporan
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	222.566.000	137.868.000	61,94%	100	Jumlah Dokumen Pelaporan Atas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1	1	Laporan
	Pengamanan Barang Milik Daerah	551.692.000	425.984.400	77,21%	100	Jumlah Dokumen Pelaporan Atas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1	1	Laporan
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	92.202.000	24.183.650	26,23%	100	Jumlah Dokumen Pelaporan Atas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5	5	Dokumen
	Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	64.962.000	50.683.300	78,02%	100	Jumlah Dokumen Pelaporan Atas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4	4	Laporan

	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	171.687.000	52.900.900	30,81%	100	Jumlah Dokumen Pelaporan Atas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2	2	Laporan
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	266.165.690	231.658.690	87,04%	100	Jumlah Dokumen Pelaporan Atas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100	100	Orang
TOTAL		453.468.199.722	378.397.264.758	83,45						

Dari data di atas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran sampai triwulan III Tahun 2024 penyerapan anggaran masih kecil yaitu **83,45 %** atau hanya terealisasi sebesar **Rp. 378.397.264.758,00,-** dari anggaran sebesar **Rp. 453.468.199.722,00,-** Pada awal tahun (triwulan IV) kegiatan yang rutin dilaksanakan adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutin seperti :

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu sub Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Evaluasi kinerja perangkat daerah dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 54.497.800,-
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 32.316.889.583,-
- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yaitu sub kegiatan Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD dan Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 9.500.000,-
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu sub kegiatan Fasilitasi kunjungan tamu, Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD dan Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.746.256.044,-

- Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yaitu sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan Penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.056.526.520,-
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 941.250.253.-
- Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah yaitu sub kegiatan Koordinasi, penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD, Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dan Koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah dengan penyerapan sebesar Rp. 3.308.125.215.-
- Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yaitu sub kegiatan Koordinasi dan pengelolaan kas daerah, Penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD, Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya, Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait, Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan, dan Pembinaan

penatausahaan keuangan pemerintah kabupate/kota dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 643.135.800.-

- Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yaitu sub kegiatan Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah dan Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota dan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran dengan penyerapan anggaran sebesar Rp 607.789.050.-
- Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu kegiatan Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan dan Pengelolaan dana bagi hasil kabupaten/kota dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 333.355.937.434.- penyerapan terbesar ada di Anggaran Dana Desa untuk pencairan siltap desa.
- Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu sub kegiatan Penyusunan standar harga, Pengamanan barang milik daerah, Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah, Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah dan Penyusunan laporan barang milik daerah dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.290.591.590.-

Dengan ini maka perlu di lakukan evaluasi secara berkala dan berjenjang agar pencapaian kinerja semua kegiatan dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana aksi Badan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta berusaha semaksimal mungkin untuk meraih tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut secara optimal meskipun dalam perjalanannya menemui kendala dan keterbatasan. Namun demikian, segenap elemen unit organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta tetap berusaha seoptimal mungkin untuk meningkatkan kinerjanya dengan melakukan berbagai strategi pemecahan permasalahan. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian kinerja atas sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam tahun 2024. Dari Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, secara keseluruhan telah tercapai, seperti capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Predikat “BAIK”, Indeks pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Predikat “BAIK” , Capaian SAKIP dengan predikat "A" dan Indeks Kepuasan Masyarakat dengan perolehan predikat "Sangat Baik". Disamping itu bila dilihat dari akuntabilitas kinerja keuangan untuk triwulan IV tahun 2024, realisasi total belanja dari dana APBD Kabupaten Purwakarta adalah sebesar Rp. **378.397.264.758,00.- (83,45o/o)** dari target total belanja yang ditetapkan sebesar Rp. **453.468.199.722,00.-**.

4.2 Saran

Dalam upaya menjaga konsistensi penguatan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka Badan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Purwakarta merumuskan beberapa strategi atas kendala yang dihadapi dalam bentuk saran melaksanakan optimalisasi dalam melakukan monitoring dan evaluasi serta percepatan penyusunan dokumen kontraktual.



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BKAD)

Jl. Gandanegara No. 25 Purwakarta Telp/Fax (0264) 200036, 200037, 200038, 200039
Website : www.bkad.purwakartakab.go.id

Purwakarta, 7 Januari 2025

Nomor : Tv.02/008/I/PKP-BKAD

Kepada:

Lampiran : 1 (satu) Lembar

Yth. Seluruh Pejabat Struktural
dan Sub-Koordinator di
Lingkup BKAD Kabupaten
Purwakarta

Perihal : Undangan

Di –

PURWAKARTA

Sehubungan dengan akan di laksanakan monitoring dan evaluasi kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan Triwulan IV Tahun 2024 Badan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta, maka kepada seluruh Seluruh Pejabat Struktural dan Sub-Koordinator di lingkungan BKAD Kabupaten purwakarta agar dapat hadir menyampaikan progress terkait evaluasi program dan kegiatan triwulan IV Tahun 2024 yang akan di laksanakan pada :

Hari/ : Senin , 10 Januari 2025

Tanggal

Waktu : 08.00 s/d Selesai

Tempat : Aula BKAD

Demikian agar maklum dan menjadi perhatian bersama.

Kepala Badan Keuangan Dan Aset
Daerah Kabupaten Purwakarta

MUCHAMAD NURCAHJA. ST., MM
NIP. 19731102 199901 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BKAD)

Jl. Gandanegara No. 25 Purwakarta Telp/Fax (0264) 200036, 200037, 200038, 200039
Website : www.bkad.purwakartakab.go.id

NOTULEN

Sidang/Rapat : Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan IV
Hari/Tanggal : Senin , 10 Januari 2025
Waktu Panggilan : 08.00
Waktu Sidang/Rapat : 08.00 s/d Selesai

HASIL MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TA. 2024

Kegiatan Rapat

Pembukaan : Rapat dibuka oleh kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta sekaligus memberikan arahan kepada peserta rapat terkait dengan pencapaian program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2024

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu sub Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Evaluasi kinerja perangkat daerah dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 54.497.800,-
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 32.316.889.583,-
- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yaitu sub kegiatan Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD dan Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 9.500.000,-

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu sub kegiatan Fasilitas kunjungan tamu, Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD dan Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.746.256.044,-
- Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yaitu sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan Penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.056.526.520,-
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 941.250.253.-
- Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah yaitu sub kegiatan Koordinasi, penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD, Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dan Koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah dengan penyerapan sebesar Rp. 3.308.125.215.-
- Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yaitu sub kegiatan Koordinasi dan pengelolaan kas daerah, Penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD, Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan

dana perimbangan dan dana transfer lainnya, Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait, Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan, dan Pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten/kota dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 643.135.800.-

- Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yaitu sub kegiatan Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah dan Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota dan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran dengan penyerapan anggaran sebesar Rp 607.789.050.-
- Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu kegiatan Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan dan Pengelolaan dana bagi hasil kabupaten/kota dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 333.355.937.434.- penyerapan terbesar ada di Anggaran Dana Desa untuk pencairan siltap desa.
- Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu sub kegiatan Penyusunan standar harga, Pengamanan barang milik daerah, Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah, Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah dan Penyusunan laporan barang milik daerah dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.290.591.590.-

Dengan ini maka perlu di lakukan evaluasi secara berkala dan berjenjang agar pencapaian kinerja semua kegiatan dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana aksi Badan Keuangan dan Aset Daerah.

- Foto-Foto Pelaksanaan Kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan IV Tahun Anggaran 2024



